

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan semakin menjadi perhatian utama investor, regulator, dan masyarakat global di masa sekarang ini[1]. Menurut *People Resources and Conservation Foundation* (PRCF), Indonesia saat ini menghadapi berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran mikroplastik, deforestasi, pencemaran udara, krisis air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pemanasan global [2]. Sebagian besar permasalahan tersebut diakibatkan oleh praktik bisnis perusahaan.

Konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) muncul sebagai indikator penting dalam menilai kinerja non-keuangan perusahaan dan keberlanjutan jangka panjang[3]. ESG diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006 melalui *Principles for Responsible Investment* (PRI) sebagai seperangkat indikator yang dirancang untuk mengukur dampak lingkungan, social dan tata kelola suatu perusahaan, Dimana faktor-faktor ESG ini memengaruhi implementasi strategis dan penciptaan nilai jangka panjang perusahaan [4]. Di Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong implementasi keuangan berkelanjutan melalui POJK No 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, yang mendorong Lembaga jasa keuangan (LJK), emiten dan perusahaan publik untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dan menerbitkan laporan keberlanjutan. Kebijakan ini

berdampak luas pada meningkatnya jumlah dan volume pengungkapan ESG oleh perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari berbagai sektor Banyak perusahaan mulai meningkatkan pengungkapan ESG dalam laporan tahunan maupun *sustainability report* sebagai bentuk komitmen terhadap praktik bisnis berkelanjutan [3]. Dari sisi dunia usaha dan investasi, ESG kini dianggap “senjata perusahaan menarik investor”, karena laporan ESG membantu investor menilai risiko dan peluang bisnis secara lebih utuh. Perusahaan dengan skor ESG tinggi sering mendapat akses pendanaan lebih mudah dan biaya modal lebih rendah, karena dianggap lebih kredibel dan berkelanjutan[5].

Pelaporan ESG merupakan pengungkapan terstruktur atas data yang berkaitan dengan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, mencakup angka-angka maupun narasi yang menunjukkan bagaimana suatu organisasi berdampak terhadap lingkungan, memperlakukan manusia, dan mengatur dirinya sendiri [6]. Sejalan dengan itu, transparansi semacam ini mampu memperbaiki persepsi publik dan investor, mengurangi risiko reputasi, memperkuat citra institusional, dan dapat memengaruhi penilaian pasar secara positif. Tekanan dari berbagai pemangku kepentingan seperti investor, regulator dan Masyarakat mendorong perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada profitabilitas semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak operasionalnya terhadap lingkungan dan masyarakat [3], [7], [8].

Namun, dengan meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan serta tekanan dari *stakeholder* tidak serta merta mencerminkan peningkatan kualitas atau ketulusan komitmen perusahaan terhadap praktik keberlanjutan. Karena hal tersebut

dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan ESG bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab nyata, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik dan investor [9]. Literatur akuntansi dan manajemen membedakan dua jenis pengungkapan ESG, yaitu pengungkapan substantif (*substantive disclosure*) dan pengungkapan simbolik (*symbolic disclosure*) [10]. Pengungkapan substantif mencerminkan perubahan nyata dalam kebijakan, struktur, dan praktik operasional perusahaan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan, sedangkan pengungkapan simbolik lebih berorientasi pada pembentukan citra (*Image building*) dan pemenuhan legitimasi sosial tanpa disertai perubahan substantif pada kinerja ESG actual [10], [11], [12]. Para peneliti menemukan adanya kesenjangan yang signifikan antara apa yang diungkapkan perusahaan dengan kinerja ESG aktualnya. Hubungan antara kinerja ESG dan pengungkapan ESG telah dieksplorasi secara mendalam oleh para akademisi, Dimana sejumlah studi menemukan hubungan positif yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang lebih kuat cenderung secara sukarela mengungkapkan lebih banyak informasi ESG sebagai sinyal pencapaian mereka untuk membedakan diri dari perusahaan dengan kinerja ESG yang buruk. Namun disisi lain, terdapat pula perusahaan yang melakukan kebalikannya. Dalam kondisi ini, pengungkapan ESG seringkali menjadi alat legitimasi yang digunakan perusahaan untuk memperoleh dukungan sosial tanpa diiringi dengan perubahan operasional yang substantif terutama di negara berkembang [9].

Ketika kesenjangan antara pengungkapan ESG dan kinerja ESG diperiksa, terdapat dua arah yang mungkin terjadi yaitu yang pertama adalah *greenwashing* ,

dimana perusahaan dapat melebih-lebihkan keterlibatan ESG mereka, dan kedua adalah *brownwashing*, dimana perusahaan meremehkan pencapaian ESG mereka serta sengaja menyembunyikan atau mengecilkan pencapaian ramah lingkungan dan hasil keberlanjutan mereka karena takut dikritik [13]. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengungkapan ESG tidak selalu mencerminkan komitmen substantif perusahaan terhadap keberlanjutan. Dalam penelitian ini, fenomena yang mencuri perhatian adalah *greenwashing*, yaitu ketika perusahaan mengungkapkan informasi ESG secara selektif tanpa didukung oleh kinerja keberlanjutan yang nyata [12]. Studi terbaru menunjukkan bahwa banyak perusahaan menggunakan ESG sebagai sarana komunikasi strategis untuk membangun citra positif dan mengurangi tekanan dari *stakeholder*. Selain itu, penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pengungkapan ESG sering kali hanya menyoroti aspek positif perusahaan dan mengabaikan dampak negatif yang sebenarnya terjadi [9]. Penelitian oleh Nurpatwinko (2025) menemukan bahwa praktik *greenwashing* di Indonesia umumnya muncul dalam bentuk pengungkapan simbolik, selektif, dan naratif yang tidak diikuti dengan implementasi keberlanjutan yang memadai [14]. Hal ini terjadi karena lemahnya standar pelaporan ESG dan kurangnya mekanisme *assurance* yang kuat sehingga perusahaan memiliki ruang untuk meningkatkan reputasi melalui laporan ESG tanpa melakukan perubahan substansial dalam aktivitas bisnisnya.

Adanya asimetri informasi antara manajemen dan investor menyebabkan kedua jenis pengungkapan ini yaitu pengungkapan simbolik dan substantif dapat terlihat serupa dari sisi kuantitas pengungkapan, namun berbeda secara fundamental dari sisi kualitas dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan [10]. Konteks pasar modal

Indonesia menjadikan isu ini relevan untuk dikaji dengan beberapa alasan : (1) perusahaan public di BEI berasal dari sektor yang sangat beragam (energi, pertambangan, keuangan, *consumer goods*, dll) dengan karakteristik *environmental sensitivity* dan tekanan *stakeholder* yang berbeda-beda, sehingga berpotensi menghasilkan pola pengungkapan simbolik maupun substantif yang bervariasi antar sektornya, (2) regulasi OJK memberi ruang fleksibilitas bagi perusahaan dalam menentukan kedalaman dan cakupan pengungkapan, sehingga membuka celah bagi praktik pengungkapan ESG simbolik yang secara formal memenuhi kepatuhan tanpa substansi yang memadai, dan (3) Lembaga seperti Refinitiv Eikon, *Sustainalytics* semakin banyak dirujuk oleh investor domestik dan asing, namun skor-skor ini umumnya berbasis pada *disclosure based metrics* yang rentan terhadap manipulasi melalui pengungkapan simbolik [15] .

Motivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan ESG simbolik bersifat multidimensi. Seiring pasar yang semakin memberikan penghargaan terhadap kinerja ESG, perusahaan mungkin secara strategis mengungkapkan informasi ESG berdasarkan motif pembiayaan yaitu dengan melebih lebihkan kinerja ESG mereka dalam kondisi asimetri informasi sehingga terlibat dalam *greenwashing*. Seperti yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia, Tbk, perusahaan tersebut mendapatkan skor pengungkapan ESG paling tinggi dari database Refinitve Eikon yaitu sebesar 88,89 [15]. Tidak hanya itu, PT Vale bahkan juga membuat sebuah highlight di website resmi perusahaannya terkait ESG yang menandakan bahwa perusahaan tersebut sangat sadar dan paham akan isu keberlanjutan. Akan tetapi, pengungkapan ESG yang tinggi tersebut tidak dibarengi dengan kondisi operasional yang nyata karena

berdasarkan artikel dari WALHI Sulsel, aktivitas tambang nikel PT Vale Indonesia di area Ferrari Hills, Desa Asuli, Luwu Timur, telah menimbulkan dampak lingkungan yang serius meliputi terjadinya bencana longsor pada tahun 2022 akibat metode pertambangan yang buruk di daerah rawan bencana, serta pencemaran sumber air baku masyarakat oleh lumpur dan polusi udara akibat debu tambang. Selain kerusakan fisik lingkungan, operasional tambang ini juga menyebabkan dampak sosial-ekonomi berupa hilangnya mata pencaharian ratusan kepala keluarga karena rusaknya lahan perkebunan merica petani, yang secara nyata mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal, terutama kelompok perempuan dan anak-anak[16]. Oleh karena itu, dapat dilihat dari sini bahwa ESG tidak hanya berfungsi sebagai indikator keberlanjutan, tetapi juga sebagai alat komunikasi strategis yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap perusahaan.

Dibalik reputasi baik yang dibangun oleh pengungkapan ESG simbolik, Pengungkapan ESG simbolik juga bisa membawa konsekuensi serius bagi berbagai pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Pengungkapan ESG yang simbolik dapat merusak reputasi public perusahaan, membahayakan hubungan dengan pemangku kepentingan, dan mengurangi kepercayaan konsumen serta investor. Secara spesifik, *greenwashing* dapat menyembunyikan klaim lingkungan yang menipu, mempengaruhi kepuasan pelanggan dan reputasi kompetensi perusahaan, serta meningkatkan risiko lingkungan yang berdampak langsung pada pembangunan hijau [17].

Chief Executive Officer (CEO) memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Karena teori upper echelons

menjelaskan bahwa karakteristik dan pengalaman *top executives* mencerminkan keputusan strategis organisasi, karakteristik personal CEO, seperti usia, *Gender*, dan narsisme, dapat mempengaruhi cara mereka memandang dan mengelola masalah keberlanjutan. Cara CEO memahami dan menangani masalah lingkungan dipengaruhi oleh latar belakang pribadi mereka [12], [13]. Akibatnya, peran CEO sangat penting dalam mengelola kinerja dan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Untuk menemukan elemen yang mendorong praktik pengungkapan ESG yang lebih baik, penting untuk memahami bagaimana sifat CEO berhubungan dengan pengungkapan ESG.

Dalam penelitian manajemen strategis, usia CEO sering menjadi fokus karena dianggap menunjukkan pengalaman, nilai-nilai pribadi, dan kecenderungan untuk mengambil risiko. Menurut penelitian sebelumnya, CEO yang berusia lebih tua cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih mempertimbangkan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang [14]. Di sisi lain, CEO yang lebih muda cenderung lebih terbuka terhadap inovasi dan perubahan, termasuk dalam penerapan praktik pengungkapan ESG [14].

Gender dalam kepemimpinan perusahaan menjadi salah satu aspek yang banyak mendapat perhatian dalam penelitian mengenai kepemimpinan eksekutif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CEO perempuan cenderung menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih melibatkan berbagai pihak dan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan [15]. Selain itu, CEO perempuan juga sering dikaitkan dengan tingkat pengungkapan sukarela yang lebih tinggi serta perhatian yang lebih besar terhadap isu sosial dan lingkungan, serta mempunyai etika dan

kesadaran social yang lebih tinggi [16]. Pada periode 2021–2024, jumlah CEO perempuan pada perusahaan yang terdaftar di BEI menunjukkan adanya peningkatan. Meskipun jumlah tersebut masih sekitar 5% dari keseluruhan perusahaan tercatat, perkembangan ini tetap menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia bisnis dan manajemen diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dan sosial dapat memberikan manfaat bagi perusahaan maupun masyarakat Indonesia [17]. Kondisi ini juga sejalan dengan upaya global dalam mendorong kesetaraan *gender* pada tingkat eksekutif serta memperkuat kajian mengenai pengaruh *gender* CEO terhadap kebijakan perusahaan, termasuk dalam pengungkapan ESG simbolik.

Selain itu, *Gender Socialization Theory* (GST) menjelaskan bahwa adanya perbedaan antara pola asuh dan sosialisasi sejak dini membentuk orientasi moral yang berbeda antara laki-laki dan Perempuan, Dimana perempuan cenderung mengembangkan *ethic of care* yang menekankan kepedulian, tanggung jawab relasional dan perhatian terhadap dampak Keputusan pihak lain. Sedangkan laki-laki cenderung mengembangkan *ethic of justice* yang berorientasi pada aturan, keadilan formal dan pencapaian hasil. Perbedaan orientasi moral ini diduga turut memengaruhi CEO dalam memandang dan menjalankan tanggung jawab social serta lingkungan perusahaan, termasuk sejauh mana pengungkapan ESG mencerminkan komitmen substantif atau hanya sekedar citra.

Narsisme saat ini dipandang sebagai salah satu karakteristik kepribadian yang dapat dimiliki oleh setiap individu, termasuk CEO perusahaan besar [18]. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar CEO perusahaan besar memiliki

kecenderungan sifat narsistik. Kondisi tersebut membuat narsisme menjadi salah satu karakteristik yang menarik perhatian peneliti dalam memahami perilaku CEO. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh karakteristik narsistik CEO yang haus akan pujian dan perhatian terhadap tingkat pengungkapan ESG simbolik perusahaan [19].

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai pengaruh karakteristik CEO terhadap pengungkapan ESG simbolik menjadi penting untuk dilakukan. Didukung oleh *upper echelons theory*[18], yang mengatakan bahwa keputusan strategis perusahaan mencerminkan karakter dari pemimpin puncak perusahaannya, maka akan dilihat apakah karakteristik CEO dapat menentukan apakah pengungkapan ESG perusahaan akan menjadi suatu kebutuhan penting yang bersifat substantif atau justru hanya akan sebagai ajang pembangun citra dimata *stakeholder*. Terlebih lagi, dalam negara berkembang, praktik ESG masih sering digunakan sebagai alat pembangun citra perusahaan karena regulasi yang belum ketat dan mekanisme pengawasan yang masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana karakteristik CEO mempengaruhi pengungkapan ESG yang bersifat simbolik sebagai strategi peningkatan reputasi perusahaan, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam memahami kualitas pengungkapan ESG dan mengidentifikasi potensi *greenwashing* dalam praktik pelaporan keberlanjutan perusahaan.

Pengungkapan ESG simbolik yang dapat dijadikan sebagai alat reputasi perusahaan ini, bisa menjadi tameng bagi perilaku oportunistik yang rentan terhadap risiko reputasi perusahaan. Pengungkapan ESG yang bersifat simbolik dinilai dapat

meningkatkan reputasi perusahaan juga dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap melakukan praktik oportunistik karena tidak perlu khawatir lagi dengan reputasi perusahaan yang sudah diselamatkan oleh pengungkapan ESG simbolik. Salah satu praktik oportunistik yaitu *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang masih diperbolehkan secara hukum. Praktik ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti transfer pricing, pemanfaatan insentif pajak, dan pengaturan struktur keuangan perusahaan [20]. Pengungkapan ESG simbolik dengan *tax avoidance* tumbuh subur di lahan yang sama, yaitu karena adanya asimetri informasi. Berdasarkan *agency theory* [19], terdapat pemisahan kekuasaan antara pemilik perusahaan dan manajer (*agen*), manajer memiliki informasi yang lebih banyak daripada pemilik mengenai operasional dan keadaan perusahaan, pemilik dan manajer memiliki kepentingan yang berbeda, manajer bisa melakukan praktik oportunistik untuk kepentingan pribadinya misalnya memaksimalkan laba setelah pajak agar mendapatkan insentif yang besar, salah satu caranya yaitu dengan *tax avoidance*. *Tax avoidance* menjadi salah satu isu yang banyak dibahas dalam penelitian di bidang akuntansi dan keuangan karena memiliki dampak yang berbeda. Di satu sisi, *tax avoidance* dapat menjadi strategi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan laba setelah pajak. Namun, di sisi lain, praktik ini dapat menimbulkan risiko terhadap reputasi perusahaan serta meningkatkan perhatian dan pengawasan dari regulator maupun pemangku kepentingan [21]. Meskipun *tax avoidance* dilakukan dengan cara yang secara hukum masih diperbolehkan, praktik ini dapat dipandang sebagai bentuk tindakan oportunistik

manajemen yang berpotensi merugikan pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan masyarakat [22]. Oleh karena itu, *tax avoidance* menjadi salah satu isu penting dalam penelitian mengenai tata kelola perusahaan dan karakteristik manajemen.

Di Indonesia, praktik *tax avoidance* telah banyak ditemukan dan melibatkan sejumlah perusahaan besar. Salah satu kasus yang pernah menjadi perhatian adalah dugaan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dan kembali mencuat pada tahun 2019. Perusahaan tersebut diduga melakukan transfer pricing dengan menjual batu bara kepada anak perusahaannya di Singapura dengan harga di bawah harga pasar. Selanjutnya, batu bara tersebut dijual kembali oleh anak perusahaan kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi. Praktik tersebut diduga menyebabkan sebagian laba perusahaan dialihkan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga pajak yang dibayarkan di Indonesia menjadi lebih kecil. Berdasarkan temuan tersebut, PT Adaro diperkirakan membayar pajak sekitar US\$125 juta atau sekitar Rp1,75 triliun lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Kondisi ini berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara dan menjadi salah satu contoh penting dalam pembahasan mengenai praktik *tax avoidance* di Indonesia [20].

Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* (2023), Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar akibat praktik penghindaran pajak oleh perusahaan, yaitu sekitar 2.736,5 juta dolar AS atau setara dengan Rp44 triliun. Selain itu, terdapat kerugian sekitar 69,8 juta dolar AS atau sekitar Rp1 triliun yang disebabkan oleh pengalihan aset ke luar negeri. Nilai tersebut dihitung menggunakan kurs Rp16.343

per dolar AS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KM.10/KF.4/2024 untuk periode 26 Juni hingga 2 Juli 2024 [24]. Berdasarkan agency theory, praktik *tax avoidance* dapat terjadi karena adanya perbedaan informasi antara manajemen dan *stakeholder* [25]. Manajemen dapat memiliki kepentingan tertentu dalam melakukan *tax avoidance*, seperti memperoleh kompensasi dan meningkatkan laba setelah pajak perusahaan. Dalam kondisi tersebut, pengungkapan ESG dapat digunakan sebagai bentuk pengalihan perhatian atau tameng reputasi untuk menciptakan kesan positif terhadap perusahaan, sehingga memberikan ruang bagi manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Penelitian empiris terbaru juga menunjukkan bahwa pengungkapan ESG dapat berkaitan dengan praktik *tax avoidance* melalui berbagai mekanisme strategis. Studi oleh Zhang et al. (2025) menemukan bahwa ketidakpastian dalam penilaian ESG mendorong perusahaan untuk meningkatkan *tax avoidance* sebagai strategi untuk mempertahankan kinerja keuangan dan meningkatkan pendanaan internal[21]. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor ESG tidak selalu mengurangi praktik *tax avoidance*, tetapi justru dapat menciptakan kondisi yang mendorong perusahaan untuk melakukan strategi pajak agresif guna mempertahankan reputasi dan stabilitas keuangan perusahaan[22]. Sebagian penelitian menggunakan skor ESG sebagai indikator pengungkapan ESG dan dari hasil tersebut kebanyakan penelitian mendapatkan hasil pengungkapan ESG berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian yang menganalisis isi dari laporan keberlanjutan dan pengungkapan ESG tersebut masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian

mengenai pengaruh dari pengungkapan ESG simbolik yang diukur dari isi laporan keberlanjutan terhadap praktik *tax avoidance* ini penting untuk dilakukan.

Lebih lanjut, penelitian pada negara berkembang menunjukkan bahwa pengungkapan ESG tidak selalu mencerminkan komitmen keberlanjutan yang nyata, terutama ketika kualitas institusi dan pengawasan masih lemah[9]. Dalam kondisi tersebut, ESG disclosure cenderung menjadi simbolik dan tidak mampu menekan praktik *tax avoidance* secara efektif. Sebaliknya, tanpa pengawasan yang kuat, perusahaan dapat menggunakan ESG sebagai strategi reputasi untuk menutupi praktik penghindaran pajak dan mempertahankan legitimasi publik. Oleh karena itu, hubungan antara pengungkapan ESG simbolik dan *tax avoidance* menjadi penting untuk diteliti, terutama dalam konteks negara berkembang yang masih menghadapi keterbatasan regulasi dan pengawasan terhadap praktik keberlanjutan perusahaan [23].

Berdasarkan uraian fenomena dan tinjauan penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi bahwa penelitian mengenai hubungan karakteristik CEO, pengungkapan ESG, dan *tax avoidance* masih memiliki dua celah utama. Pertama, penelitian terdahulu umumnya menempatkan pengungkapan ESG sebagai mediator dari karakteristik dewan komisaris secara kolektif, belum secara spesifik menguji karakteristik individual CEO sebagai pengambil keputusan puncak. Kedua, penelitian-penelitian tersebut cenderung mengukur ESG dari sisi performa atau kuantitas pengungkapan, belum membedakan secara eksplisit antara pengungkapan yang bersifat substantif dan yang bersifat simbolik (*greenwashing*). Penelitian ini berupaya mengisi kedua celah tersebut dengan menguji pengaruh karakteristik

individual CEO (usia, *gender*, narsisme) terhadap pengungkapan ESG yang secara spesifik diukur sebagai strategi simbolik, serta menguji perannya terhadap tax avoidance dalam konteks pasar modal Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis hubungan bertahap antara karakteristik CEO yang memengaruhi pengungkapan ESG simbolik dan bagaimana pengungkapan ESG simbolik tersebut memengaruhi tax avoidance, yang di rinci sebagai berikut:

1. Apakah karakteristik CEO berpengaruh terhadap pengungkapan ESG simbolik?
 - a. Apakah usia CEO berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG simbolik?
 - b. Apakah *gender* CEO berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG simbolik?
 - c. Apakah narsisme CEO berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG simbolik?
2. Apakah pengungkapan ESG simbolik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan dalam rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini ditujukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh karakteristik CEO terhadap pengungkapan ESG simbolik.
 - a. Menganalisis pengaruh negatif usia CEO terhadap pengungkapan ESG simbolik
 - b. Menganalisis pengaruh negatif *gender* CEO terhadap pengungkapan ESG simbolik.
 - c. Menganalisis pengaruh positif narsisme CEO terhadap pengungkapan ESG simbolik.
2. Menganalisis bagaimana pengungkapan ESG simbolik memengaruhi *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana *Upper Echelons Theory* mendasari hubungan karakteristik CEO terhadap pengungkapan ESG simbolik, bagaimana *Gender Socialization Theory* menjelaskan hubungan *gender* CEO terhadap pengungkapan ESG simbolik, serta bagaimana *agency theory* menjelaskan bahwa pengungkapan ESG dapat menjadi tameng reputasi dalam melakukan *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh peneliti selama menempuh bangku perkuliahan, khususnya pemahaman akuntansi keperilakuan, isu keberlanjutan serta perpajakan.
- b) Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk investor, analis, regulator, dan publik, dalam menginterpretasikan hubungan bertahap CEO yang membuat strategi pengungkapan ESG serta bagaimana strategi tersebut dapat memengaruhi *tax avoidance*.
- c) Penelitian ini dapat membuka pintu untuk penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi lebih lanjut mengenai hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Ini dapat menjadi landasan untuk penelitian yang lebih mendalam dan meluas dalam bidang ini, terutama akuntansi keperilakuan, perpajakan serta isu keberlanjutan.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengaruh karakteristik CEO terhadap strategi pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta bagaimana strategi pengungkapan ESG yang bersifat simbolik atau *greenwashing* memengaruhi praktik *tax avoidance* perusahaan. Karakteristik CEO yang dikaji dalam penelitian ini mencakup aspek demografis dan psikologis seperti usia, *gender*, dan tingkat narsisme CEO. Karakteristik tersebut diyakini memengaruhi

keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam menentukan tingkat dan kualitas pengungkapan ESG. Dalam konteks ini, pengungkapan ESG tidak hanya dipandang sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan, tetapi juga dapat digunakan sebagai strategi simbolik untuk meningkatkan legitimasi dan reputasi perusahaan tanpa diikuti dengan praktik keberlanjutan yang substansial. Dalam penelitian ini ESG dipandang sebagai alat untuk membangun citra positif perusahaan dan mengurangi tekanan dari *stakeholder*, terutama di negara berkembang dengan regulasi yang relatif lemah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan perusahaan, serta sumber data lain yang relevan terkait pengungkapan ESG dan informasi karakteristik CEO. Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan tiga karakteristik CEO yaitu usia CEO, *gender* CEO, dan narsisme CEO, sehingga karakteristik lain yang mungkin memengaruhi kebijakan perusahaan tidak dianalisis dalam penelitian ini. Kedua, pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan indikator tertentu yang umum digunakan dalam literatur akuntansi yaitu *Effective Tax Rate* (ETR), sehingga hasil penelitian bergantung pada pendekatan pengukuran yang digunakan. Ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi secara langsung pada perusahaan di negara yang berbeda.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang membahas berbagai aspek dalam proses penelitian. Bab I membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta sistematika penulisan penelitian. Bab II menjelaskan teori dan konsep yang menjadi dasar penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis. Bab III membahas metode penelitian yang digunakan, meliputi desain penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis. Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai temuan yang diperoleh dari pengujian hipotesis. Selanjutnya, Bab V berisi kesimpulan penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

